

Komunikasi Politik: Awal Terbentuknya Negara Islam Madinah

Oleh: Mohammad Ali Wafa

Pengabdian masyarakat disampaikan pada ceramah habis magrib di Masjid Al Anshor, Ds. Pinang Habang, Wanaraya, Barito Kuala

Hadirin yang kami hormati.

Saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baginda mendirikan Negara, yang disebut Negara Madinah. Rasulullah SAW membuat suatu piagam politik sebagai upaya untuk mengatur kehidupan di Madinah yang ditempati oleh beragam golongan. Beliau menganggap sangat penting adanya suatu aturan pokok untuk menata kehidupan bersama agar tercipta suatu kesatuan hidup antar masyarakat (Sukardja, 2012 dalam.(Mulyo, 2023)

Negara Madinah merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki konstitusi secara tertulis, atau yang sering disebut dengan piagam madinah atau konstitusi madinah. Hadirnya piagam Madinah ini tak lepas dari sejarah perjalanan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW serta masyarakat Madinah pada waktu itu. Madinah pada saat itu merupakan negara kota yang berhasil dirubah menjadi negara bangsa oleh Rasulullah SAW serta merupakan tempat yang dihuni bukan hanya kelompok muslim saja, namun di luar muslim juga menetap di Madinah seperti suku Auz dan Khazraj yang merupakan suku terkemuka dan juga kuat dari golongan Arab yang berasal dari Arab Selatan. Selain itu, golongan Yahudi lain juga tinggal di Madina. Terdapat lebih dari 20 suku menetap di Yastrib, yakni Bani Qaynuqa', Bani Quraydzah Bani Nadir, bani Tsa'labah dan Bani Hadh merupakan Bani yang terkemuka dari golongan Yahudi (Nafis, 2003). Piagam ini mampu untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang heterogen itu menjadi satu kesatuan. Hadirnya piagam Madinah juga didukung oleh komunitas masyarakat (Ummah) menjadi kelompok sosial (community) yang mempunyai kekuatan politik pada pasca kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah. Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Rasulullah ini terdiri dari 47

Pasal yang berisikan mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban dalam bernegara, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta toleransi antar agama (Mulyo, 2023)

Piagam Madinah merupakan *political Legal Documen* yang menjadi cikal bakal lahirnya Negara Madinah pada abad ke 7 Masehi. Piagam ini penting keberadaannya karena Yastrib (sebelum berubah namanya menjadi Madinah) dihuni oleh kabilah multietnik dan agama yang memang memerlukan kesepakatan agar hadir suatu perlindungan dari masing-masing kaum. (Hakim, 2021 dalam (Mulyo, 2023)

Tatkala Rasul hijrah ke Madinah dimana sejumlah besar kaum Yahudi berada, urusan negara yang pertama dilakukan beliau adalah mengadakan perjanjian dengan mereka yang isinya antara lain, aqidah mereka dihormati kaum muslimin harus bahu-membahu menghadapi siapapun yang bermaksud jelek terhadap Madinah. Dengan perjanjian itu berarti Rasulullah telah menerapkan prinsip-prinsip toleransi keagamaan dalam benih-benih peetama bagi peradaban Islam.(As-siba'i, 2013).

Rasulullah Saw mempunyai tetangga-tetangga Ahli Kitab. Ia bergaul baik dengan mereka, memberi mereka hadiah-hadiah dan menerima pula hadiah-hadiah mereka. Bahkan, seorang wanita Yahudi pernah memasukkan racun ke dalam daging kambing yang dihadihkan kepadanya karena kebiasaannya menerima hadiah wanita itu dan bertetangga baik dengannya. Ketika utusan Nasrani Habasyah datang, Rasulullah menempatkan mereka di masjid. Beliau bertindak sendiri dalam menjamu dan melayani mereka. Di antara perkataan saat itu: Mereka telah menghormati sahabat- sahabat kita. Maka aku ingin menghormati mereka dengan diriku. (As-siba'i, 2013).

Berkaitan dengan itu, Komunikasi Politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik

yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. (Thaib, 2019)

Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosial kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR. Konsep, strategi, dan teknik kampanye, propaganda, dan opini publik termasuk dalam kajian bidang ilmu komunikasi politik. Jika disimak secara seksama, fungsi komunikasi itu sangat banyak. Banyak peminat komunikasi atau ilmuwan komunikasi yang sudah memaparkan persepsinya tentang fungsi komunikasi, tetapi mereka belum mampu memuaskan semua pihak. Masih memungkinkan muncul persepsi lain tentang fungsi komunikasi. (Thaib, 2019)

Harold D. Lasswell, memaparkan bahwa fungsi komunikasi sebagai berikut:

1. Menjaga atau mengawasi lingkungan (surveillance of the environment);
2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk lingkungannya (correlation of the part of society in responding to the environment); dan
3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya (transmission of social heritage).

Menurutnya ada tiga kelompok yang selama ini melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Fungsi pertama dijalankan oleh para diplomat, atase, dan koresponden luar negeri sebagai usaha menjaga lingkungan. Fungsi kedua lebih diperankan oleh para editor, wartawan, dan juru bicara sebagai penghubung, respon internal. Fungsi ketiga dilaksanakan oleh para pendidik dalam lingkungan pendidikan formal atau informal karena terlibat dalam mewariskan adat kebiasaan, nilai-nilai dari generasi ke generasi. (Thaib, 2019)

Wiliam I. Gorden⁵ mengungkapkan empat kerangka fungsi komunikasi, yaitu sebagai berikut; Pertama, komunikasi sosial. Dengan komunikasi, manusia dapat berhubungan sosial dengan sesama manusia lainnya dalam upaya memupuk silaturahmi, membangun aktualisasi diri, menanamkan citra diri, dan bekerja sama dalam berbagai bentuk kehidupan guna mempertahankan kelangsungan hidup. (Thaib, 2019)

Kedua, komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ini berkaitan erat dengan komunikasi sosial. Dalam kehidupannya memupuk komunikasi sosial, manusia memiliki keinginan untuk mengungkapkan berbagai perasaan dirinya terhadap pihak lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Berbagai perasaan manusia, seperti sayang, rindu, cinta, benci, peduli, simpati, sedih, takut, dan marah diungkapkan kepada manusia lain melalui berbagai bentuk pesan-pesan, baik verbal maupun nonverbal. Ketiga, komunikasi ritual. Manusia hidup tidak dapat melepaskan diri dari sistem kehidupan yang sudah dibentuk sebelumnya. Prosedur-prosedur kehidupan yang nyaris sebagian sudah melekat menjadi sebuah keyakinan dan keharusan dilakukan oleh manusia dalam menjalani fase-fase kehidupan. Pengungkapan berbagai perasaan sebagaimana komunikasi ekspresif dalam konteks memenuhi prosedur sistem kehidupan yang sudah diyakini, seperti pelaksanaan upacara kelahiran, ulang tahun, pernikahan, sampai pada upacara kematian merupakan bagian dari fungsi komunikasi ritual. (Thaib, 2019)

Keempat, komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental lebih pada fungsi komunikasi untuk melakukan tindakan persuasif, yakni untuk membujuk orang atau pihak lain dengan berbagai penguatan informasi yang diberikan. Komunikasi ini bertujuan menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan serta perilaku atau menggerakkan tindakan dan menghibur orang atau pihak lain. (Thaib, 2019)

Rudolph F. Verderber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Sebagian keputusan itu dibuat sendiri dan sebagian lagi

dibuat setelah berkonsultasi dengan orang lain. Sebagian keputusan bersifat emosional dan sebagian lagi melalui pertimbangan yang matang. Semakin penting, keputusan yang akan dibuat, semakin berhati-hati dalam melalui tahapan untuk membuat keputusan. Kecuali bila bersifat reaksi emosional, keputusan itu biasanya melibatkan pemrosesan informasi, berbagai informasi dan dalam banyak kasus, persuasi karena manusia tidak hanya perlu memroses data, tetapi sering juga memperoleh dukungan atas keputusannya. (Thaib, 2019)

Sebenarnya banyak pendapat para pakar komunikasi yang dapat dikutip yang memaparkan fungsi komunikasi. Namun, kalau disimak, keseluruhan pendapat tersebut kembali kepada hakikat fungsi komunikasi, yakni membangun hubungan vertikal dan horisontal. Kendati jika ditakar lebih banyak pakar yang menitikberatkan komunikasi horisontal saja, yakni mengungkap hubungan manusia dengan manusia lainnya. Terdapat tiga unsur pokok proses komunikasi, yakni pemberi pesan, pesan, dan penerima pesan. Dalam model komunikasi klasik dari Aristoteles, ketiga komponen itu ditegaskan dengan istilah speaker, message, dan listener. (Thaib, 2019)

Shannon dan Weaver mengistilahkan ketiga unsur tersebut dengan information source, message, dan receiver. Sementara Schramm menyebutnya encoder, message, decoder. Kemudian Berlo menyebutnya source, message, dan receiver, serta istilah-istilah lainnya yang disodorkan oleh para ilmuwan komunikasi. Walaupun terdapat berbagai istilah yang digunakan, ketiga unsur tersebut menjadi sentral utama terjadinya proses komunikasi yang ditandai dengan interaksi simbolik antar pihak yang terlibat di dalamnya. (Thaib, 2019)

Hal yang sama juga terjadi dalam komunikasi politik. Walaupun kebanyakan peneliti komunikasi politik menggunakan model Lasswell, tetap saja inti model tersebut terpusat dari ketiga unsur tersebut, walaupun dalam gambaran modelnya Lasswell tidak menyebutkan secara eksplisit istilah komunikator, pesan dan komunikan. Lasswell mengungkapkan model komunikasinya secara verbal dengan lima pertanyaan: who (siapa sumbernya), says what (apa yang disampaikan), in which channel (melalui media apa), to whom (siapa sasaran), with what effect (apa pengaruhnya). (Thaib, 2019)

Komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari pandangan teori interaksi simbolik. Sebab dalam prosesnya pertukaran pesan dilakukan melalui berbagai atribut atau simbol- simbol dari masing-masing partai politik maupun aktor politik. Misalnya, pada saat kampanye simbol-simbol, bendera partai banyak menggunakan gambar/foto dari para aktor politik. Penggunaan simbol-simbol tersebut menurut Eep Saefullah Fattah adalah ingin terlihat menonjol. Di mana penonjolan semacam ini ternyata sangat bersifat simbolik sehingga teori interaksi simbolik sebagai pendekatan yang bermanfaat untuk menggali berbagai pengertian tentang kehidupan kelompok manusia dengan fokus sentralnya tentang interaksi dan komunikasi politik yang dilakukan untuk mempertukarkan pesan-pesan politik dalam pemilihan calon-calon politik tertentu. (Thaib, 2019)

Teori interaksi simbolik pada dasarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar, yaitu perspektif fenomenologis, di mana tokoh utamanya adalah George Herbert Mead. Dia mengungkapkan bahwa keseluruhan sosial mendahului pemikiran individu baik secara logika maupun secara temporer. Individu yang berpikir dan sadar diri adalah mustahil secara logika tanpa di dahului adanya kelompok sosial. Menurut Mead kelompok sosial muncul lebih dulu, dan kelompok sosial menghasilkan perkembangan keadaan mental kesadaran diri. (Thaib, 2019)

Esensi dasar dari teori Mead adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Blumer mengintegrasikan gagasan-gagasan interaksi simbolik dengan John Dewey, William I. Thomas dan Charles H. Cooley. Gagasan mereka tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol- simbol. Hal ini didasarkan pada tiga asumsi, yaitu: Pertama, individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanistik, tidak pula bergantung bagaimana eksternal; alih-alih, respons mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi

sosial. Jadi, individu yang dipandang aktif menentukan lingkungan mereka sendiri. (Thaib, 2019)

Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, dan gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Artinya, logis antara nama atau simbol dengan objek yang dirujuknya meskipun kita terkadang sulit untuk memisahkan kedua hal itu. Melalui penggunaan simbol itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia. (Thaib, 2019)

Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan ia lakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespons ucapan atau tindakan mereka. Proses pengambilan-peran tertutup (*covert role-taking*) itu penting, meskipun hal itu tidak teramati. Karena itu, kaum interaksionis simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan tindakan terbuka, menganggap tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari tindakan tertutup. (Thaib, 2019)

Ketiga asumsi tersebut di atas, disimpulkan Blumer dalam tiga premis, yaitu: (a) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu, (b) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (c) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Seperti yang ditegaskan Blumer, maka perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. (Thaib, 2019)

Persepektif interaksi simbolik menurut Besker menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Defenisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri sendiri ditentukan oleh perilaku mereka sendiri. Karena itu menurut Johanes manusia bertindak hanya berdasarkan defenisi atau penafsiran mereka atas objek- objek di sekeliling mereka, dan tidak digolongkan sebagai kebutuhan dan dorongan impuls (hati), tuntutan budaya, atau tuntutan peran. Bagi Blumer proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menengakkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. (Thaib, 2019)

Berkaitan dengan teori interaksi simbolik ini, maka Ritzer meringkas teori ini kedalam prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1. Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berpikir. 2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial. 3. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir. 4. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (action) dan interaksi yang khas manusia. 5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi. 6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan 7. kemudian memilih salah satunya. (Thaib, 2019)

Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan Berdasarkan ketiga premis dan ringkasan teori di atas, menurut Engkus Kuswarno terdapat esensi bahwa komunikasi atau pertukaran simbol yang

diberi makna merupakan suatu aktivitas yang khas di antara manusia. Selain itu seseorang akan menjadi manusiawi hanya melalui interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi yang terjadi antara manusia akan membentuk masyarakat. Karena manusia secara aktif membentuk perilakunya sendiri. Kesadaran dan pikiran melibatkan interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Berkaitan dengan kemampuan manusia untuk dapat merespon simbol- simbol diantara mereka berinteraksi, menurut Mead membawa penjelasan interaksi simbolik kepada konsep tentang diri (self). Apa yang menjadi penekanan dalam teori ini sangat relevan dengan penelitian ini. Karena konsep Mead tentang diri yang lebih menekankan pada konsep “pengambilan peran orang lain” (taking the role of the other), atau penjabaran “diri sosial” (social self) adalah dilakukan melalui makna yang dikonstruksikan secara sosial. (Thaib, 2019)

Dengan demikian, maka konsep diri sebagai suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain dapat diterapkan dalam proses komunikasi politik antaraktor politik, atau di luar aktor politik. Di samping konsep diri ini, juga interaksi sosial individu melalui makna maupun simbol-simbol komunikasi baik simbol verbal maupun non verbal. (Thaib, 2019)

Komunikasi politik selain dapat dianalisis dari perspektif ilmu komunikasi dan ilmu politik, juga dapat dianalisis melalui perspektif komunikasi Islam. Komunikasi Islam itu sendiri dalam pandangan Harjani Hefni adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip- prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan asas Al-Qur'an dan Sunnah, komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta serta dengan sesame untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan terminologi di atas dapat dipahami bahwa komunikasi Islam tidak semata sebagai sebuah praktek komunikasi yang bertujuan untuk berkiririr pesan dengan tujuan terbangunnya suatu pandangan yang sama tentang obyek yang dikomunikasikan, namun lebih dari itu, komunikasi Islam berupaya membangun sebuah komunikasi yang berkarakter yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam dalam rangka membangun kedamaian, keramahan dan komunikasi

harmonis dengan sesama. Islam sebagai sebuah agama, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan termasuk juga urusan politik. Islam adalah agama yang tidak bisa dipisahkan dari politik, karena politik itu berkaitan dengan hajat hidup umat manusia dari hingga kini termasuk juga umat Islam. Nabi Muhammad saw juga adalah seorang politisi yang memimpin negara Madinah, dan dalam konteks beliau sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw juga melakukan praktek komunikasi politik, baik secara verbal maupun menggunakan media, hal ini sebagaimana yang dipraktikkan dalam mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Madinah dengan tujuan untuk mengajak mereka masuk Islam. (Thaib, 2019)

Dalam kehidupan politik umat Islam di Indonesia, praktek komunikasi politik dapat ditemukan dalam aktivitas politik para tokoh politik Islam yang berasal dari berbagai latar belakang sosial politiknya. Aktor politik Islam bisa jadi adalah orang Islam yang sejak awal merupakan politisi murni. Atau bisa juga adalah tokoh agama yang kemudian terjun ke dunia politik, misalnya kiai. Dalam posisinya sebagai aktor politik, seorang kiai sudah pasti akan melakukan kegiatan komunikasi politik. Komunikasi politik kiai tidak bisa dilepaskan dari perspektif Islam. Hal ini dikarenakan semua aspek kehidupan kiai tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin ajaran Islam yang dilakukan sehari-hari. Ajaran Islam memang sangat menekankan komunikasi yang beradab termasuk juga dalam komunikasi politik. Al-Qur'an memberikan alternatif komunikasi yang menyentuh jiwa misalnya dengan model komunikasi qawlan layyinan. Model komunikasi ini menekankan pada pembicaraan yang lemah lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Dengan qawlan layyinan hati komunikan akan tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi. Dengan demikian, dalam komunikasi Islam semaksimal mungkin dihindari kata-kata yang kasar dan intonasi suara yang bernada tinggi dan keras. (Thaib, 2019)

Atas dasar prinsip di atas maka komunikasi politik yang dibangun oleh seorang kiai akan memiliki kecenderungan pada komunikasi yang beretika atau komunikasi yang memiliki ciri akhlakul karimah. Komunikasi politik yang dibangun adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk menjalin hubungan

sesama manusia dan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hidup secara kolektif melalui jalur politik. Akhlakul karimah menjadi karakteristik yang khas dari komunikasi Islam hal ini dikarenakan komunikasi Islam harus memiliki kaitan yang erat dengan sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Komunikasi Islam menekankan konten komunikasi dan metode komunikasinya haruslah diwarnai oleh perintah agama. Artinya komunikasi yang beretika harus memiliki nilai-nilai etika yang tinggi dalam menyampaikan pesan, tidak menggunakan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan komunikan atau khalayak. (Thaib, 2019)

Dengan penekanan pada etika dalam berkomunikasi, maka komunikasi Islam akan memberikan perpektif yang lebih baik bagi komunikasi politik. Komunikasi politik meskipun ditujukan untuk sebanyak mungkin meraih keuntungan politik, namun bila dibangun dengan asas komunikasi Islam akan terhindar dari praktek komunikasi politik yang bertendensi menyerang, saling menjatuhkan dan jauh dari nilai-nilai etika. Kolaborasi antara komunikasi politik dan komunikasi Islam akan melahirkan praktek komunikasi politik yang santun yang akan berimplikasi pada praktek politik yang ramah sehingga keputusan-keputusan politik yang dilahirkan merupakan keputusan politik yang dinantikan khalayak karena akan merupakan jawaban atas berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan.

Penutup

Berdasarkan sudut pandang komunikasi politik, dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam misi keagamaan dan kenegaraan. Komunikasi politik dalam perspektif ilmu komunikasi dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek komunikasi mekanistik yang bertumpu pada teori Lasswell yakni komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak tertentu melalui suatu media dengan efek tertentu. Dalam konteks politik, komunikator, pesan, dan efek, semuanya bertendensi politik.

Aspek yang kedua adalah interaksi simbolik yang bersandar pada teori George Herbert Mead. Berdasarkan pandangan ini maka setiap politisi atau kelompok politik akan mengedepankan suatu atribut khas sebagai simbol identitas dirinya dalam sebuah proses komunikasi positif. Komunikasi politik dalam perspektif ilmu politik adalah wahana yang bisa digunakan untuk

mengkomunikasikan pesan politik yang tujuan akhirnya adalah pencapaian kekuasaan dalam berbagai dimensinya. Dari perspektif ilmu politik, komunikasi politik bisa diperankan oleh politisi yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan tertentu, atau bisa juga diperankan oleh profesional di mana dia dengan keahliannya menghubungkan kepentingan politik dengan khalayak sarannya.

Komunikasi politik dalam perspektif komunikasi Islam menekankan pada praktek komunikasi politik yang beretika. Model komunikasi ini dibangun berdasarkan teori Hefni yang menyatakan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan landasan ini, maka model komunikasi politik yang terbangun adalah komunikasi politik yang beretika yang jauh dari praktek komunikasi politik yang saling serang dan saling menjatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- As-siba'i, M. (2013). *Peradaban Islam*.
- Indriani, S. S., Puspitasari, L., & Rosfiantika, E. (2019). Analisis Interaksi Simbolik pada Konten Ofensif Iklan Grab #pilihaman. *ProTVF*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i1.21245>
- Maghfira, T. A., & Mahadian, A. B. (2018). Interaksi Simbolik Pengajar dan Siswa di Komunitas Matahari Kecil. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.24815/jkg.v7i1.10540>
- Mulyo, R. P. H. (2023). Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan. *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 7(2), 1–12.
- Suhan, Y., Sakaria, Genda, A., Haris, A., & Amin, A. R. (2020). PELABELAN MASYARAKAT PERDESAAN TERHADAP JANDA MUDA DI DESA SAILONG KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE. *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)*, 2(2).
- Thaib, E. J. (2019). Komunikasi Politik Ditinjau dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Komunikasi Islam. *Farabi*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1030>